

# Kementerian Agama Memacu Prestasi dengan Menggenjot Reformasi Birokrasi



Ketua BPK Hadi Purnomo menyerahkan LHP (Laporan Hasil Pemeriksaan) atas Laporan Keuangan Kementerian Agama kepada Menteri Agama, di Gedung BPK, Jakarta, Selasa (8/6). Nampak mendampingi Sekjen Kemenag Bahrul Hayat, Irjen Kemenag Suparta dan pejabat eselon I lainnya.

Setelah sukses menyelenggarakan ibadah haji dengan sangat baik pada musim haji tahun 2009 lalu, Kementerian Agama (Kemenag) kembali mendulang prestasi dengan berhasil meraih opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan tahun anggaran 2009. Prestasi ini meningkat dibanding perolehan sebelumnya yang selama lima tahun berturut-turut selalu mendapat predikat Disclaimer (tidak menyatakan pendapat).

Hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun anggaran 2009 menunjukkan masih ada 8 kementerian/lembaga pemerintah yang memperoleh predikat Disclaimer. Syukurlah, Kemenag tidak termasuk di dalamnya, karena telah dinyatakan naik peringkatnya dari Disclaimer menjadi WDP.

"Saya memberikan apresiasi kepada Menteri Agama atas peningkatan

laporan keuangan Kementerian Agama tahun ini dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan opini ini sekaligus membuktikan bahwa Kementerian Agama telah berupaya menjadi tauladan bagi pengelolaan keuangan di Indonesia. Semoga ini merupakan wujud nyata dari komitmen kita semua dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan transparan," kata Ketua BPK Hadi Poernomo, usai menyerahkan laporan hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Kemenag tahun anggaran 2009 kepada Menteri Agama Suryadharma Ali di kantor BPK, 8 Juni lalu. Sejumlah pejabat eselon satu ikut mendampingi Menteri Agama, antara lain Sekretaris Jenderal Kementerian Agama Bahrul Hayat, dan Inspektur Kementerian Agama Mundzier Suparta.

Pemeriksaan BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) merupakan amanah dari UU

Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan atas Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara. BPK dapat memberikan empat jenis opini, yakni Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), Tidak Menyatakan Pendapat (TMP), dan Tidak Wajar (TW). Pemberian opini tersebut berdasarkan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) dan ada tidaknya pembatasan lingkup dari laporan keuangan dalam pemeriksaan BPK untuk semua hal yang menurut pertimbangan profesional BPK dianggap material/signifikan.

Perbaikan opini Kemenag itu tentu cukup menggembirakan dan sesuai dengan target yang telah dicanangkan saat itu. Hal ini membuktikan adanya perbaikan kinerja laporan keuangan Kemenag dibanding tahun-tahun sebelumnya. Kendati begitu, Menag Suryadharma Ali mengingatkan agar jajarannya tidak lekas puas diri.

Bahkan tahun 2010 ini, Menag telah memasang target untuk meraih predikat WTP.

## Reformasi Birokrasi

Setelah sukses meraih prestasi dengan menyelenggarakan ibadah haji dengan sangat baik tahun 2009 dan memperoleh peningkatan opini dari Disclaimer menjadi WDP, ke depan Kemenag bersiap mendulang prestasi yang lebih banyak lagi. Untuk menuju ke sana, upaya yang tengah digenjut saat ini adalah melakukan reformasi birokrasi.

Kemenag sangat berkepentingan melakukan reformasi birokrasi untuk menumbuhkan budaya kerja yang berorientasi prestasi dan terus menerus bertekad memberantas korupsi. Apalagi, Presiden RI, Susilo Bambang Yudhoyono telah bertekad melaksanakan reformasi birokrasi secara menyeluruh pada tahun 2011 untuk menciptakan aparat yang bersih dan berwibawa. Reformasi birokrasi ini

penting karena akan mengoptimalkan seluruh elemen birokrasi pemerintahan baik untuk memperbaiki pelayanan publik maupun meningkatkan tata kerja yang efektif, efisien, profesional, transparan, dan akuntabel.

Dalam pandangan Sekretaris Jenderal Kementerian Agama RI, Bahrul Hayat, inti reformasi birokrasi itu mencakup dua aspek. Pertama, mengubah seluruh mekanisme kerja agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, profesional, dan akuntabel. Kedua, melakukan reformasi seluruh sumber daya yang dimilikinya, terutama sumber daya manusia (SDM). "Aspek yang kedua itu merupakan implikasi dari reformasi yang pertama. Dalam menempatkan orang juga harus sangat terukur, dan kompetensinya harus relevan," katanya.

Menurut Sekjen Kemenag, reformasi birokrasi itu ibarat menggelindingkan sebuah roda besar agar jalannya menjadi cepat. Tetapi, melakukan perubahan di sebuah kementerian besar seperti Kemenag bukan hal yang mudah. Kalau kementerian/lembaga pemerintah yang memiliki jumlah karyawan sekitar 300 orang, saya tidak melihat sebagai masalah. Namun, Kemenag yang memiliki 4.381 titik satuan kerja dan karyawan PNS-nya saja sekitar 220.000 orang, tentu tidak mudah melakukan proses reformasi dengan cepat.

"Meski demikian, bagi kami reformasi birokrasi itu lebih cepat lebih baik. Sebab, hanya melalui mekanisme itu kita memiliki kekuatan untuk mempercepat good governance di Kemenag dan dilakukan secara sistematis," tegas Bahrul Hayat.

Walaupun tantangan yang dihadapi semakin banyak, Menteri Agama Suryadharma Ali meminta reformasi birokrasi yang dijalankan Kementerian Agama tidak boleh berhenti, bahkan tidak boleh ditunda. "Reformasi birokrasi itu justru bertujuan agar tercipta penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih. Hal itu tercermin dari pelayanan yang bermutu kepada masyarakat dan birokrasi yang efektif, efisien, akuntabel serta terhindar dari segala bentuk penyimpangan," katanya.